

© 2006 Petrus F.T.P. Tampubolon
Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702)
Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor
Sem 1, 2006/07

Posted 2 December 06

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng
Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto

**ANALISIS PERANAN PERBANKAN DALAM
MEMAJUKAN SEKTOR USAHA KECIL-MIKRO
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR, PROPINSI SUMATERA UTARA)
(Rencana Proposal Penelitian)**

Oleh:

Petrus F.T.P. Tampubolon
NRP. P062059394
pftpt@telkom.net

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup telah mendorong peningkatan pembangunan di segala sektor. Tetapi pembangunan itu sendiri telah menimbulkan efek samping yaitu terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Kerusakan atau pencemaran lingkungan pada gilirannya akan merugikan manusia yakni menurunnya tingkat kesejahteraan dan menurunnya kualitas hidup. Karena itu pengelolaan sumberdaya alam harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara

itu ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan akan sumberdaya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem dapat rusak. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan maupun organisasi, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perbankan mempunyai fungsi intermediasi: mengumpulkan dana dari pihak ketiga (dana masyarakat) dan kemudian menyalurkannya kepada debitur dalam bentuk fasilitas kredit. Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum kredit dimaksud dapat direalisasikan/dicairkan yang dikenal dengan istilah *pre-disbursement clause*.

Pre-disbursement clause dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan bank setelah kredit berjalan, dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau debitur dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Pelestarian fungsi lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, baik individu maupun lembaga yang memanfaatkan sumberdaya lingkungan itu. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan setiap warga negara berkewajiban untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup.

Kewajiban pengelolaan lingkungan oleh industri-industri skala besar dan menengah telah diatur dalam perundang-undangan. Salah satu contoh aturan yang diberlakukan untuk industri yang berskala besar dan mempunyai dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup adalah kewajiban untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk didalamnya membuat Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagai salah satu syarat dikeluarkannya izin usaha (Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999). Apabila dalam analisa dan pertimbangan komisi penilai AMDAL dinilai bahwa rencana usaha/kegiatan tersebut tidak layak secara lingkungan maka rencana usaha/kegiatan tersebut direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan. Untuk jenis usaha/kegiatan yang lebih kecil yang mempunyai dampak kecil diwajibkan untuk membuat dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Namun untuk skala usaha kecil-mikro belum diatur tentang kewajiban membuat dokumen pengelolaan lingkungan.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana halnya yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka semua pihak bertugas dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan pembangunan tanpa menghalangi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Perbankan adalah salah satu lembaga ekonomi yang sangat berperan dalam mendukung kelangsungan suatu usaha/kegiatan dalam bentuk penyediaan modal usaha. Sebagaimana telah diutarakan diatas bahwa ketentuan untuk mewajibkan usaha kecil-mikro untuk membuat dokumen pengelolaan lingkungan sampai saat ini belum diatur. Ketentuan yang sudah ada adalah bagi skala usaha menengah dan besar. Kebijakan perbankan tentang aspek lingkungan dalam rangka pencairan kredit bagi usaha/industri juga masih berlaku hanya bagi skala usaha besar dan menengah (Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005). Dalam kaitan ini kebijakan perbankan untuk mewajibkan usaha kecil-mikro untuk menjaga kelestarian lingkungan juga belum diakomodasi. Kebijakan-kebijakan perbankan dalam rangka mendorong/mewajibkan pihak debitur untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan saat ini juga belum memadai. Kebijakan/regulasi yang dikeluarkan perbankan untuk pengelolaan lingkungan ini tentu saja harus sinkron dengan kebijakan-kebijakan lain yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga tidak tumpang tindih. Dengan demikian masih perlu pengkajian bagaimana perbankan dapat menetapkan kebijakan/regulasi yang dapat menjamin debitur melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan baik, khususnya untuk usaha kecil-mikro.

Dari sisi lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agar tidak merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil apabila terakumulasi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya juga dapat berubah menjadi dampak besar. Usaha kecil-mikro yang berdasarkan skala usahanya dapat menghasilkan dampak negatif yang relatif kecil bagi lingkungan apabila terakumulasi maka akan dapat berubah menjadi dampak negatif besar.

Pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha kecil-mikro yang telah dikeluarkan perbankan juga perlu dipantau efektivitasnya, apakah regulasi tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Dalam pelaksanaannya juga perlu diketahui apa hambatan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat disusun formulasi kebijakan yang lebih baik tanpa menghambat pengembangan usaha kecil-mikro. Dengan demikian diperlukan instrumen yang bisa memantau pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kajian-kajian untuk dapat mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa wewenang untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah ditangan negara. Negara dapat memberi wewenang kepada departemen-departemen/lembaga teknis untuk membuat ketentuan/aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga perbankan juga dapat berperan dalam membuat aturan dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup bagi unit usaha yang berkaitan dengannya. Namun kebijakan dan regulasi yang akan dibuat harus sejalan dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dikeluarkan departemen teknis. Dengan demikian diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang peranan perbankan dalam membuat kebijakan/regulasi dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pada sektor usaha kecil-mikro, sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan lain.

Kabupaten Toba Samosir merupakan wilayah pemekaran (kabupaten baru) yang berada di Propinsi Sumatera Utara, yang pendiriannya diresmikan pada tahun 1999. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini dinilai cukup baik dan masih dapat digali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Kabupaten Toba Samosir menarik untuk dijadikan sebagai obyek penelitian mengingat potensi sumberdaya alam dan karakteristik/profil kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana peranan perbankan saat ini dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Toba Samosir?
2. Apakah kebijakan/regulasi yang dikeluarkan perbankan cukup efektif dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro sekaligus mengendalikan tingkat kerusakan/degradasi sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Toba Samosir?
3. Bagaimana peranan perbankan di masa depan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, melalui pengembangan sektor usaha kecil-mikro di wilayah Kabupaten Toba Samosir?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perkembangan sektor usaha kecil-mikro dan kondisi/potensi sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Toba Samosir.
2. Memberikan gambaran mengenai peranan perbankan saat ini dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Toba Samosir.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan/regulasi yang dikeluarkan perbankan dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro sekaligus mengendalikan tingkat kerusakan/degradasi sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Toba Samosir.
4. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi bagi perbankan untuk meningkatkan perannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, melalui pengembangan sektor usaha kecil-mikro di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan pada dasarnya ditujukan untuk perlindungan lingkungan dengan tetap mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam telah menjadi perhatian internasional. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara di dunia telah berhasil mengeluarkan kesepakatan tentang paradigma pembangunan yang baru yang dikenal dengan istilah “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*). Dengan demikian diperlukan suatu upaya yang holistik untuk mendorong program yang memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara efisien dan dapat melindungi ketersediaannya.

Usaha kecil-mikro dapat dipandang sebagai aktor utama suksesnya pembangunan berkelanjutan, apabila di dalam menjalankan usahanya prinsip-prinsip pelestarian fungsi lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun kenyataan saat ini kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan masih sangat rendah, upaya pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya masih sangat menonjol tanpa disertai upaya optimal untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat usaha tersebut.

2.2. Kebijakan-Kebijakan Perbankan dalam Pengelolaan Lingkungan

Perbankan dalam perannya menjalankan fungsi intermediasi mempunyai hubungan keterkaitan dengan pihak debitur. Bank akan mendapat keuntungan pendapatan bunga dan propisi dari pinjaman debitur, disisi lain debitur mendapat tambahan modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Usaha yang berdampak negatif bagi lingkungan akan menyebabkan ketidakberlanjutan usaha, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap bank sebagai krediturnya.

Pada bulan Januari 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral dan regulator perbankan di Indonesia, telah mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang salah satu diantaranya memasukkan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu komponen dari sisi prospek usaha khusus untuk “penilaian kualitas aktiva” dalam bentuk “kredit”. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005.

Pada tingkat global, berbagai lembaga keuangan dunia seperti IFC, JBIC, ADB, KfW serta beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia sudah mempunyai program dan aturan-aturan mengenai pengelolaan lingkungan; demikian juga dengan berbagai organisasi-organisasi internasional. Salah satu organisasi dibawah naungan PBB yaitu UNEP (*United Nations Environment Programme*), melalui UNEP “Financial Initiative” (UNEP FI) telah mengeluarkan *UNEP Statement by Banks on Environment and Sustainable Development*. UNEP FI telah melakukan berbagai kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan dapat mengambil peran dengan lebih efektif bagi keberlanjutan usaha di masa mendatang. Pada saat kebijakan seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan internasional ini belum dapat dijalankan, masih banyak hal yang perlu dikaji agar perbankan dapat mengambil peranan dalam upaya pengelolaan lingkungan melalui kebijakan/regulasi dalam

pencairan kredit.

Studi berkenaan dengan peranan perbankan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada sektor usaha kecil-mikro telah dilakukan di banyak negara, termasuk oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia (*The World Bank*) dan Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization of The United Nations*).

Jayaraman dan Lanjouw (2004) melaporkan hasil studi kasus di Brazil tentang keterkaitan antara industri skala kecil, peraturan lingkungan hidup dan kemiskinan.

Centner (2002) melakukan studi tentang pengembangan kebijakan/peraturan yang dibutuhkan untuk mengurangi dampak pencemaran air yang diakibatkan oleh usaha peternakan di Amerika Serikat.

Billiot dan Daughtrey (2001) melakukan studi untuk mengevaluasi beban kewajiban yang timbul akibat dampak kerusakan lingkungan (*environmental liability*) dengan mengenakan premi resiko terhadap fasilitas pinjaman yang diperoleh para pelaku usaha sektor agribisnis.

Gudger dan Barker (1993) menerbitkan buku yang mengkaji tentang pentingnya peranan perbankan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

2.3. Usaha Kecil-Mikro (UKM)

Usaha kecil-mikro merupakan jenis usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang lebih baik dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, perkembangan usaha kecil-mikro terus meningkat. Secara sektoral, sekitar 60% dari total usaha kecil-mikro adalah usaha yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, kemudian sekitar 23% bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sekitar 7% bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi dan sisanya tersebar di sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih.

Mengingat pentingnya peranan sektor usaha kecil-mikro, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sudah sewajarnya sektor ini mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan sehingga benar-benar bisa menjadi penyangga utama perekonomian nasional. Bahkan di era globalisasi saat ini, sektor usaha kecil-mikro memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kompetitif dan berintegrasi dengan perekonomian modern.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2004), industri kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 5-19 orang, dan industri kerajinan rumah tangga adalah usaha industri yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga diklasifikasikan atas:

- 1) Industri makanan, minuman dan tembakau.
- 2) Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
- 3) Industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga.
- 4) Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.
- 5) Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik.

- 6) Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
- 7) Industri logam dasar.
- 8) Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.
- 9) Industri pengolahan lainnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode

Metode penelitian adalah metode survey yang didisain bersifat deskriptif.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan unit-unit usaha kecil-mikro, pakar perbankan, praktisi perbankan, pejabat pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir dan instansi lain yang terkait. Data sekunder adalah data umum yang mendukung penelitian, yang diperoleh dari perpustakaan, internet, lembaga penelitian dan instansi yang relevan, seperti: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, BAPEDAL, departemen/dinas teknis (perindustrian, perdagangan, pertambangan, pertanian, dll), Bank Indonesia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan daftar isian/pertanyaan (kuesioner) terkait dengan peranan perbankan dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan.

Responden yang dituju adalah para pelaku usaha kecil-mikro dan praktisi perbankan, khususnya di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Pemilihan dan penentuan jumlah responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil dan Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Toba Samosir

Kabupaten Toba Samosir dibentuk dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Toba Samosir merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Toba Samosir terletak di bagian tengah Propinsi Sumatera Utara di jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang.

Secara geografis Kabupaten Toba Samosir terletak pada $2^{\circ}03' - 2^{\circ}40'$ Lintang Utara, $98^{\circ}56' - 99^{\circ}40'$ dan 300 - 2.200 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Toba Samosir berbatasan dengan Kabupaten Simalungun di sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan

Labuhan Batu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

Kabupaten Toba Samosir, yang memiliki luas daratan 2.021,80 km², terdiri dari 11 kecamatan dengan 192 desa/kelurahan, yaitu 179 desa dan 13 kelurahan. Dari 11 kecamatan tahun 2004, Habinsaran merupakan kecamatan dengan luas daratan terluas, yaitu 732,06 km² atau 36,21%. Diurutan kedua Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan luas 386,95 km² atau 19,14%. Sedangkan Sigumpar merupakan kecamatan yang memiliki luas daratan terkecil, yaitu 25,50 km² atau 1,26%.

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Toba Samosir berjumlah 174.382 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 88,39 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Toba Samosir tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 1990 adalah sebesar 0,51%.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir berjumlah 167.907 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000 sampai 2004 adalah -0,94%. Adapun jumlah rumah tangga sebesar 36.749 rumah tangga, dengan rata-rata anggota per rumah tangga tahun 2004 sekitar 4,6 jiwa.

Balige yang merupakan ibukota Kabupaten Toba Samosir memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 47.412 jiwa (28,24%) dengan 8.784 rumah tangga, disusul Kecamatan Porsea dengan 24.689 jiwa (14,70%) dengan 5.768 rumah tangga. Sedangkan Kecamatan Sigumpar merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 6.624 jiwa (3,94%) dengan 1.615 rumah tangga.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Toba Samosir tahun 2004 sebesar 83,05 km²/jiwa. Berdasarkan kecamatan, keragaman tingkat kepadatan penduduk cukup heterogen. Balige sebagai ibukota kabupaten merupakan daerah yang paling padat, dengan tingkat kepadatan penduduk 410,49 jiwa/km², diikuti Kecamatan Sigumpar dengan 259,76 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Pintu Pohan Meranti yaitu hanya 20,49 jiwa/km².

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan Kabupaten Toba Samosir tahun 2004 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sebagai perbandingan, rasio jenis kelamin tahun 2004 sebesar 97,14, artinya setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 97 orang penduduk laki-laki. Atau dalam presentase dapat dinyatakan bahwa sekitar 50,73% merupakan penduduk perempuan dan sisanya 49,27% penduduk laki-laki.

Besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 1.748.167,51 juta, menurun sebesar 13,22% dibandingkan tahun 2003. Sedangkan berdasarkan atas harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Toba Samosir tahun 2004 sebesar Rp. 1.285.571,32 juta, menurun sebesar 16,29% dibandingkan tahun 2003.

Berdasarkan lapangan usa, sektor industri merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Toba Samosir tahun 2004. Kontribusi yang diberikan oleh sektor industri bagi pembentukan PDRB Kabupaten Toba Samosir adalah 38,17%. Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar 32,76%.

Sektor industri merupakan sektor yang menunjukkan penurunan yang cukup berarti dalam pembentukan PDRB tahun 2004, hal ini dapat dilihat

dari perannya tahun 2003 sebesar 50,62% turun tajam menjadi 38,17% pada tahun 2004. Sementara sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor terkecil dalam memberi kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yaitu hanya 0,28%.

PDRB per kapita Kabupaten Toba Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 10.411.522,51 mengalami penurunan sebesar 13,65% bila dibanding tahun 2003. Sementara berdasarkan atas dasar harga constan, PDRB per kapita tahun 2004 sebesar Rp. 7.656.448,63 mengalami penurunan sebesar 16,69% dibanding tahun 2003.

Adapun visi dan misi Kabupaten Toba Samosir adalah :

Visi

Mewujudkan Kabupaten Toba Samosir sebagai wilayah pembangunan pertanian, pariwisata dan industri yang ramah lingkungan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk melaksanakan pembangunan secara merata dan transparan dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Toba Samosir untuk siap dalam persaingan pada era globalisasi.
2. Meningkatkan pembangunan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengembangkan agribisnis dan agroindustri dalam rangka memberdayakan dan memberikan kemakmuran rakyat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk saling bahu membahu dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberdayakan dan mengayomi serta membina masyarakat ke arah yang dinamis, untuk berkemampuan mengembangkan kemandirian.
5. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
6. Memanfaatkan lahan kosong untuk tujuan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dan industri (*agroforestry and agroindustry*) sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
7. Menjadikan sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, yang berbasis teknologi tepat guna dan manajemen yang mapan, guna memberdayakan dan menggerakkan aktivitas perekonomian rakyat.
8. Memanfaatkan dan meningkatkan potensi sumberdaya alam secara bijaksana serta melestarikan kawasan yang berfungsi lindung dan berkelanjutan.
9. Mewujudkan Daerah Toba Samosir sebagai daerah tujuan wisata dengan mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk peningkatan pendapatan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kelembagaan serta manajemen yang mengacu kepada dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif terhadap investor dalam dan luar negeri.

Tabel 1. Luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Toba Samosir

No	Nama Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah desa / kelurahan	Jumlah penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balige	115,50	39	47.412
2	Laguboti	73,90	20	16.945
3	Habinsaran	732,06	15	19.959
4	Borbor	188,79	6	7.533
5	Silaen	62,60	14	10.608
6	Sigumpar	25,50	8	6.624
7	Porsea	109,30	39	24.689
8	Pintu Pohan Meranti	386,95	10	7.928
9	Lumban Julu	111,50	15	11.179
10	Uluan	118,70	17	8.281
11	Ajibata	97,00	9	6.749
	Total	2.021,80	192	167.907

Sumber data : Toba Samosir dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Toba Samosir.

4.2. Peranan Perbankan dalam Memajukan Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Toba Samosir

Perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Jumlah bank di Kabupaten Toba Samosir tahun 2004 berjumlah 19 buah (baik bank kantor cabang maupun unit), terdiri dari 11 bank pemerintah, 1 bank daerah dan 7 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan data dari Bank Indonesia Cabang Medan, dana yang terhimpun oleh bank umum di Kabupaten Toba Samosir (giro, simpanan berjangka dan tabungan) dari masyarakat pada posisi bulan September 2004 berjumlah Rp. 330,317 milyar (hanya jenis simpanan dalam rupiah). Dari jumlah tersebut sekitar 19,28% terhimpun melalui giro, 17,75% melalui simpanan berjangka dan 62,97% melalui tabungan.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2000-2004 di Kabupaten Toba Samosir (dalam Rp. Juta)

No.	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	433,619.46	458,922.79	506,492.77	537,541.90	572,631.29
2	Pertambangan dan Penggalian	2,024.95	2,517.36	3,108.02	4,112.04	4,888.18
3	Industri	91,770.43	103,285.78	118,773.02	1,019,897.91	667,288.98
4	Listrik, Gas dan Air Minum	7,044.41	10,625.85	14,674.36	15,886.44	18,874.17
5	Bangunan	48,315.63	58,034.27	65,756.09	72,642.41	83,563.51
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	92,104.95	110,309.48	124,875.02	141,727.13	157,895.06
7	Pengangkutan dan Komunikasi	33,350.66	38,376.55	47,930.76	50,056.77	54,557.83
8	Keuangan, Asuransi, Persewaan dan Jasa Perusahaan	32,755.04	39,523.51	45,637.37	47,142.10	52,837.07
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	88,190.02	99,831.70	113,646.61	125,699.06	135,631.42
	Total	829,175.55	921,427.29	1,040,894.02	2,014,705.76	1,748,167.51

Tabel 3. Jumlah perusahaan/usaha industri kecil menurut kelompok industri per kecamatan di Kabupaten Toba Samosir

No	Nama Kecamatan	Jumlah Perusahaan/Usaha Industri Kecil Menurut Kelompok Industri					
		Pangan	Sandang & Kulit	Kimia & Bahan Bangunan	Kerajinan Umum	Logam	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Balige	24	210	28	41	6	309
2	Laguboti	18	45	14	17	4	98
3	Habinsaran	8	14	5	8	3	38
4	Borbor	2	3	-	4	-	9
5	Silaen	4	78	2	4	3	91
6	Sigumpar	2	20	2	1	-	25
7	Porsea	30	18	18	11	7	84
8	Pintu Pohan Meranti	2	5	-	6	-	13
9	Lumban Julu	8	20	7	4	2	41
10	Uluan	10	156	2	3	4	175
11	Ajibata	5	-	3	2	3	13
	Total	113	569	81	101	32	896

Sumber data : Toba Samosir dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Toba Samosir.

Tabel 4. Posisi kredit bank umum di Kabupaten Toba Samosir menurut sektor ekonomi dan bulan periode Oktober 2003-September 2004 (dalam Rp. Juta)

Bulan	Sektor Ekonomi										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Oktober	13.097	-	2.671	-	14.913	21.803	461	6.238	16.535	29.291	105.009
Nopember	13.377	-	3.001	-	13.427	23.435	356	6.923	15.095	29.239	104.853
Desember	13.329	-	3.246	-	7.636	24.097	456	9.117	15.251	28.491	101.623
Januari	13.314	-	1.150	-	4.819	25.357	476	7.231	18.379	27.655	98.381
Februari	13.444	-	1.143	-	4.164	25.912	505	8.907	18.531	27.882	100.488
Maret	13.739	-	1.271	-	8.242	26.891	426	11.051	18.649	27.485	107.754
April	8.815	-	1.259	-	7.481	27.115	539	12.413	18.660	27.546	103.828
Mei	9.083	-	1.532	-	10.343	29.202	517	13.947	18.366	27.017	110.007
Juni	9.095	-	4.822	-	9.861	26.203	528	15.164	17.887	27.011	110.571
Juli	9.268	-	6.044	20	11.106	29.549	689	1.525	35.736	20.107	114.044
Agustus	9.738	-	5.850	20	11.281	29.755	668	1.625	36.122	20.292	115.351
September	10.329	-	2.326	-	10.096	33.758	704	1.615	36.336	21.302	116.466

Catatan : Sektor ekonomi

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Listrik, Gas dan Air
5. Konstruksi
6. Perdagangan
7. Pengangkutan
8. Jasa Dunia Usaha
9. Jasa Sosial
10. Lain-lain

Sumber data : Toba Samosir dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Toba Samosir.

Jumlah kredit yang disalurkan bank umum di Kabupaten Toba Samosir pada posisi bulan September 2004 sebesar Rp. 116.466 juta, artinya bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana masyarakat yang disimpan di bank hanya sebesar 35,26%. Dengan nilai LDR 35,26%, perbankan masih mempunyai ruang yang cukup luas untuk meningkatkan perannya dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Pada waktu yang sama, sektor yang paling besar mendapatkan kucuran dana kredit adalah sektor jasa sosial yang mencapai Rp. 36.336 juta atau 31,20%, disusul oleh sektor lain-lain sebesar Rp. 21.302 juta atau 18,29%. Sedangkan sektor yang mendapat kucuran kredit terkecil diluar sektor pertambangan dan listrik, gas dan air adalah sektor pengangkutan yang hanya mendapat Rp. 704 juta atau 0,60%.

Tabel 5. Posisi kredit usaha kecil (KUK) bank umum di Kabupaten Toba Samosir menurut sektor ekonomi dan bulan periode Oktober 2003-September (dalam Rp. Juta)

Bulan	Sektor Ekonomi										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Oktober	8.729	41	3.347	-	13.060	31.936	461	6.238	16.488	786	81.086
Nopember	9.009	97	3.770	-	11.316	34.252	356	6.923	15.052	364	81.139
Desember	9.738	99	4.054	-	6.922	35.151	456	8.817	15.213	360	80.810
Januari	9.615	91	1.801	-	3.741	36.397	476	6.931	18.373	409	77.834
Februari	9.953	21	1.496	-	3.045	36.804	505	8.607	18.498	358	79.287
Maret	9.619	74	1.159	-	-	27.606	-	10.454	4.751	-	53.663
April	10.234	99	1.729	-	4.467	39.490	539	12.113	18.631	354	87.656
Mei	10.660	99	2.170	-	4.776	42.120	517	13.710	18.355	354	92.761
Juni	10.529	99	5.477	-	4.943	39.631	528	14.864	17.942	354	94.367
Juli	9.709	85	4.585	20	5.243	31.535	645	1.225	11.371	354	64.772
Agustus	10.083	99	4.607	20	5.679	31.731	626	1.325	10.614	354	65.138
September	10.715	100	3.154	-	6.060	33.151	664	1.615	9.846	354	65.659

Catatan : Sektor ekonomi

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Listrik, Gas dan Air
5. Konstruksi
6. Perdagangan
7. Pengangkutan
8. Jasa Dunia Usaha
9. Jasa Sosial
10. Lain-lain

Sumber data : Toba Samosir dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Toba Samosir.

Jumlah kredit usaha kecil yang disalurkan perbankan pada posisi bulan September 2004 adalah Rp. 65.659 juta atau 56,38% dari total jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum. Sektor yang paling besar mendapatkan KUK adalah sektor perdagangan sebesar Rp. 33.151 juta.

Pada saat yang sama, sektor perindustrian dan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Toba Samosir, yaitu Rp. 667,288.98 juta dan Rp. 572,631.29 juta, hanya memperoleh kucuran KUK masing-masing sebesar Rp. 3.154 juta (4,80% dari total KUK) dan Rp. 10.715 juta (16,32% dari total KUK).

Dengan mempertimbangkan kontribusi sektor perindustrian dan sektor pertanian dalam PDRB, maka perbankan berpeluang untuk meningkatkan penyaluran KUK pada kedua sektor ini sehingga diharapkan dapat lebih memacu peningkatan PDRB Kabupaten Toba Samosir.

4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan/regulasi yang dikeluarkan perbankan dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara dan diskusi dengan praktisi/pakar perbankan (*professional judgement*), pendapat para pelaku usaha pada sektor ekonomi kecil-mikro dan uraian pada beberapa literatur, dapat dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan/regulasi perbankan dalam memajukan sektor usaha kecil-mikro yang berwawasan lingkungan, antara lain :

1. Tingkat suku bunga bank, baik tingkat bunga simpanan maupun tingkat bunga pinjaman.
2. Persyaratan pengajuan dan pencairan kredit yang ditetapkan oleh bank.
3. Cara pengembalian kredit, termasuk jangka waktu pengembalian kredit.
4. Kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia / petugas perbankan dalam memahami karakteristik usaha dan memahami karakteristik pengusaha kecil-mikro.
5. Rasio antara proyeksi perolehan keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha kecil-mikro dalam menjalankan konsep usaha yang berwawasan lingkungan.

Tabel 6. Jumlah bank berdasarkan kepemilikan per kecamatan di Kabupaten Toba Samosir

Nama Kecamatan	Jumlah Bank Berdasarkan Kepemilikan			
	Pemerintah	Daerah	BPR	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Balige	5	1	2	8
Laguboti	1	-	2	3
Habinsaran	-	-	1	1
Borbor	-	-	-	-
Silaen	1	-	-	1
Sigumpar	-	-	-	-
Porsea	2	-	2	4
Pintu Pohan Meranti	-	-	-	-
Lumban Julu	2	-	-	2
Uluan	-	-	-	-
Ajibata	-	-	-	-
T o t a l	11	1	7	19

Sumber data : Toba Samosir dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Toba Samosir.

4.4. Evaluasi dan rekomendasi bagi perbankan untuk meningkatkan perannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, melalui pengembangan sektor usaha kecil-mikro di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Dari hasil evaluasi data yang ada, peranan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi di Kabupaten Toba Samosir masih belum berjalan optimal. Tingkat LDR sebesar 35,26% yang ada saat ini masih berpotensi untuk dapat ditingkatkan secara bertahap sehingga dapat lebih menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat tanpa harus merusak lingkungan dan sumberdaya alam yang ada.

Beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat meningkatkan peranan perbankan di Kabupaten Toba Samosir antara lain :

1. Membuat peta (*mapping*) potensi atas setiap jenis sektor ekonomi berdasarkan :
 - a. Jumlah penyerapan tenaga kerja.
 - b. Tingkat pengembalian (kualitas) kredit.
 - c. Potensi dampak yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan.
2. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat sejak awal proses pemberian dan pemantauan kredit.
3. Memberi kredit dalam kelompok-kelompok kecil dan tiap kelompok dipimpin oleh satu orang ketua. Resiko gagal bayar oleh salah seorang anggota kelompok dalam kelompok tertentu akan ditanggung bersama-sama (tanggung-renteng) oleh anggota kelompok lainnya.
4. Memberikan kredit dalam batas/radius tertentu yang masih dapat terpantau dengan baik oleh petugas bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Aspek Lingkungan dalam Kebijakan Kredit Bank Indonesia. <http://www.menlh.go.id>. Tanggal 07 Februari 2005, Jakarta.
- _____. 2005. Penerapan Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Perbankan. <http://www.menlh.go.id>. Tanggal 20 Desember 2005, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2005. Statistik Indonesia 2004. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2005. Toba Samosir Dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.
- Billiot, M.J. and Daughtrey, Z.W. 2001. *Evaluating Environmental Liability through Risk Premiums Charged on Loans to Agribusiness Borrowers*. John Wiley & Sons, Inc. USA.
- Centner, T.J. 2002. *Expanding Regulatory Requirements for Poultry Producers in the United States to Curb Water Pollution*. *World's Poultry Journal Science Journal*, Vol. 58, December 2002. USA.

Gudger, W.M. and Barker, D.C. 1993. *Banking for the Environment. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.*

Jayaraman, R. dan Lanjouw, P.F. 2004. *Small-Scale Industry, Environmental Regulation, and Poverty: The Case of Brazil. The World Bank Economic Review, Vol. 18, No. 3. USA.*